



PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MERANGKUL UMKM (Studi Kasus pada KSPPS BMT Pratama Cahaya Mentari Rawalumbu)

WAHIDIN MUSTA'IN BILLAH
wahidin@ibm.ac.id

Program Studi Ekonomi Islam Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

ABSTRACT

Since the time of the Covid-19 Pandemic, economic sectors have implemented a work from home (WFH) policy as well as the world of education organizing school activities and lectures online. This condition encourages the public to comply with government directions so that there is no wider spread of Covid-19. With the existence of restrictions on community activities in various fields, those who really feel the impact are the entrepreneurs of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This research uses qualitative research methods with primary and secondary data. This study finds that it is necessary to have the role of financial institutions that can support the capital of MSMEs. Sharia Financial Institutions (LKS) are institutions engaged in the financial sector, both collection and financing as well as operations in other financial services. As an LKS, in carrying out its role, KSPPS BMT Pratama Cahaya Mentari has the potential to run with extraordinary support from Muhammadiyah residents and the local environment. In addition to support from the community, BMT PCM has strong pillars, including diverse and solution products and services. The latest system of procedures, prudence, and compliance with SDI's sharia and integrity, professional and competent leadership, infrastructure that seeks to be reliable, sturdy and adaptive, safe, and directed. The implementation of KSPPS BMT Pratama Cahaya Mentari has been running 51%.

Keywords: *Role, Islamic Financial Institutions, MSMEs.*

PENDAHULUAN

Pada bulan Maret 2020, terhitung ada 176 negara di dunia yang terkena dampak covid-19 akibat dari virus spesies baru bernama corona. Virus berbentuk mahkota ini, pertama kali ditemukan di Wuhan, salah satu provinsi yang ada di daratan China. Dengan sangat cepat, virus menyebar hingga ke hampir seluruh negara-negara di Asia, Amerika, bahkan Eropa. Sebagai salah satu negara yang berada di kawasan Asia, dan terlebih lagi memiliki hubungan kerja sama bilateral dengan China, sudah barang tentu Indonesia pun tak luput dari terkena dampak pandemi tersebut.



Kerjasama bilateral antara Indonesia dengan China tidak hanya dalam bidang ekonomi dan perdagangan semata, tetapi juga di bidang pariwisata. Kerjasama di bidang perdagangan, yaitu ekspor-impor, sudah terjalin sejak tahun 2011 hingga sekarang. Total transaksinya sudah mencapai lebih dari 44,5 miliar dolar AS. Sedangkan di dalam bidang pariwisata, sudah lebih dari dua juta orang wisatawan China datang ke Indonesia, yang itu berarti telah mencapai 12,5% dari total wisatawan asing yang masuk ke Indonesia.

Solusi untuk menghentikan penyebaran virus corona yang ditempuh oleh seluruh negara di dunia adalah melakukan *lockdown*. Di mana masyarakat dari luar wilayah tidak boleh masuk, pun demikian juga dengan orang-orang dari dalam sebuah wilayah, tidak bisa keluar wilayah. Buntut dari tindakan *lockdown* tersebut adalah tersendatnya roda perekonomian di hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia.

Untuk wilayah Indonesia, kita ambil saja salah satu contohnya, yaitu Jakarta. Pada saat badai covid-19 sedang dahsyatnya melanda, Jakarta sebagai pusat pemerintahan, sekaligus perdagangan, memberlakukan kebijakan PSBB, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar, di mana kemudian kebijakan ini diikuti oleh daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Dengan demikian kemudian timbul kebijakan WFH atau *Work From Home* sebagai bentuk dari PSBB tersebut. Untuk dunia pendidikan, semua tingkat sekolah, dari taman kanak-kanak hingga perkuliahan dilakukan dengan sistem daring atau belajar jarak jauh secara online dari rumah.

Dampak dari kebijakan *lockdown* dan PSBB ini paling besar dirasakan oleh para pelaku UMKM, yaitu usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah. Sebab, mereka tidak bisa melakukan kegiatan usahanya sebagaimana biasanya, seperti misalnya kegiatan produksi, marketing, dan juga distribusi.

Penyebaran covid-19 sudah pasti menimbulkan dampak terhadap sektor UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan, dan investasi. Contoh dampak pada sektor perdagangan misalnya, para wisatawan yang datang ke tempat wisata pada umumnya akan membeli oleh-oleh.

Karena dampak dari pandemi, jumlah wisatawan yang datang pun berkurang drastis, sehingga hal itu membuat omset UMKM pun menjadi anjlok (Azwar Iskandar: 2020). Sesuai dengan data yang ada di Bank Indonesia, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah mengalami peningkatan yang sangat pesat dan mendominasi pada tahun 2016. Dengan demikian, banyak tenaga kerja yang diserap oleh pos ekonomi kerakyatan itu. Secara otomatis, mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Pada masa pandemi, kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pun memberikan dampak pada bidang investasi, pariwisata, dan perdagangan. Pendapatan pajak dari perdagangan pun mengalami penurunan. Padahal selama ini, perdagangan menduduki urutan kedua tertinggi dalam hal pembayaran pajak.



TINJAUAN PUSTAKA

Peran UMKM

Tidak bisa diremehkan peranan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) selama ini terhadap perekonomian nasional. Menurut Bank Indonesia, ada beberapa peran strategis UMKM, yaitu: a) Tenaga kerja yang diserap relatif besar, setiap investasi selalu membuka banyak kesempatan kerja. b) Jumlahnya banyak dan ada di setiap sektor ekonomi; c) Mampu memanfaatkan bahan baku lokal/ setempat untuk menghasilkan produk baik yang dibutuhkan masyarakat dengan harga relatif terjangkau. Meskipun memiliki posisi yang sedemikian strategis, namun UMKM tetap masih memiliki banyak permasalahan serta menghadapi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Walaupun persoalan dan kendala-kendala tersebut adalah masalah klasik, yaitu: 1) Modal 2) Bahan baku 3) Birokrasi serta pungutan 4) Manajemen 5) Teknologi 6) Kemitraan 7) Informasi dan pemasaran 8) Infrastruktur (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2009).

LKS – BMT Sebagai Solusi

Keberadaan lembaga keuangan yang yang mampu menjadi penopang perihal permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangatlah diperlukan. LKS, atau Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah lembaga di bidang keuangan. LKS menyediakan layanan pembiayaan, penghimpunan dana, serta operasional di bidang jasa keuangan lainnya bagi nasabah atau masyarakat yang memakai jasanya. Keadilan dan kemitraan adalah prinsip dasar dari lembaga keuangan ini. Di mana prinsip ini menjadi kelebihan dari LKS sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Setiap aktivitas yang dijalankan oleh LKS mesti memenuhi dua syarat yang menjadi prinsip tersebut, termasuk aktivitas pembiayaan untuk UMKM. Salah satu wujud dari pelaksanaan prinsip tersebut adalah tidak adanya praktik bunga pinjaman atas modal yang diberikan. Transaksi pembiayaan pun bersifat dua arah, antara LKS dan UMKM . 4 Salah satu lembaga keuangan syariah yang paling banyak didatangi oleh pelaku UMKM dalam upayanya memperoleh dana modal usaha ialah perbankan syariah dan *Baitul Maal wat-Tamwil*. Sedangkan untuk membantu para mustahik yang bergerak di bidang UMKM adalah Baznas, yaitu Badan Amil Zakat Nasional. (Khuzafah Hanum, Advertisements, akses tgl 23 Oktober 2020).



Peran besar Lembaga Keuangan Syariah lainnya ialah dalam usahanya menghimpun dana masyarakat. Dana-dana yang berhasil dihimpun tersebut kemudian disalurkan sebagai modal usaha, sehingga kemudian terjadilah pertumbuhan ekonomi. Dari sini sudah menunjukkan bahwa LKS memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi negara. Sebab, keberadaan modal itu sangat vital bagi setiap usaha. Dengan modal bisa mengubah benda yang tidak bermanfaat menjadi benda yang bermanfaat. Contohnya, sebuah lahan kosong, ia hanya memiliki potensi, namun tidak bisa diambil manfaat. Lahan tersebut baru bisa menjadi produktif jika ada modal. Misalnya dengan modal itu digunakan untuk mengubah lahan kosong tersebut menjadi area perkebunan atau bangunan ruko. (Abdurrahman Firdaus Thaha, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia,"162).

Peran Dan Fungsi LKS (BMT)

Masalah ekonomi akan selalu ada, sepanjang usia manusia di muka bumi. Manusia akan selalu berupaya untuk mencari jalan keluar dari persoalan tersebut. Ada yang dalam upayanya tersebut menjauhkan diri dari sikap moral, persepsi budaya, dan keberagaman. Akan tetapi, ada pula yang sebaliknya, yaitu menyatukan upaya tersebut dengan sikap moral, persepsi budaya, dan sikap moral. Upaya dan pendekatan kegiatan ekonomi ada yang menghindarkan diri dari sikap moral, keberagaman dan persepsi budaya, namun ada juga sebaliknya yang menyatukan dengan sikap moral, keberagaman dan persepsi budaya.

LKS sangat berbeda dari lembaga keuangan konvensional. Baik asas, prinsip, serta peranannya dalam pembangunan ekonomi. Berdasarkan sebuah survei, Indonesia merupakan negara dengan jumlah lembaga keuangan syariah terbanyak di dunia. Dalam satu dekade terakhir bank-bank syariah bermunculan bak jamur di musim hujan. Hal itu menunjukkan sebuah indikasi, bahwa mulai banyak masyarakat yang berpegang pada syariat dalam kelangsungan perekonomiannya. Di mana prinsip-prinsip bank syariah adalah mewujudkan keadilan, kejujuran dan kesetaraan dengan sistem kerja sama bagi hasil.

Akhir-akhir ini, di masyarakat banyak bermunculan transaksi-transaksi berbasis syariah yang memberikan kemudahan-kemudahan. Hal itu menjadi bukti, bahwa ternyata, sistem ekonomi syariah sangat diterima oleh masyarakat umum. Jika melihat kembali ke belakang, sistem ekonomi ini sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW. Hingga kini, telah menyebar di hampir seluruh negara di dunia. BMT atau Baitul Maal wat Tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah. Nilai-nilai Al-Quran dan Hadits menjadi dasar dari operasional lembaga ini. Dengan itu diharapkan tercapai perilaku dan watak bisnis yang sehat, wajar, dinamis, dan berkeadilan dan dijamin oleh kepastian hukum.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008, nomor 20, mengemukakan bahwa, yang disebut dengan usaha mikro adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih, tidak termasuk bangunan dan tanah, sebesar 50 juta rupiah. Pada kenyataannya, para pelaku usaha yang datang ke BMT rata-rata memiliki kekayaan yang jauh dari kategori itu. Sebab mereka adalah para pedagang kaki lima, tukang sayur, pedagang keliling, dan lain sebagainya.

Allah melarang manusia melakukan riba. Dasar hukumnya jelas ada di dalam Al-Quran. Pada praktiknya, perbankan konvensional memakai sistem bunga dalam operasi usahanya, di mana sistem bunga ini menyerupai riba, yaitu melipatgandakan pembayaran.

Menurut Data Statistik Perbankan Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2016 s/d 2019 terjadi banyak peningkatan namun tak sedikit pula yang mengalami penurunan. OJK juga mencatat sekitar 20 (dua puluh) bank yang terdapat UUS dari mulai bank besar hingga bank-bank yang di daerah-daerah pun sudah memiliki UUS.

Pada tabel 1.1 dapat dilihat dari tahun ke tahun banyak UUS yang memiliki perubahan signifikan yang naik setiap tahun, namun ada juga yang tidak mengalami perubahan. Bahkan ada beberapa yang menurun juga meskipun penurunannya tidak banyak. Hal ini disebabkan kurangnya minat dan ketidaktahuan masyarakat tentang UUS.

Tabel 1.1. Jumlah Kantor Layanan Syariah dan Unit Usaha Syariah

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	473	398	401	434
2	PT. Bank Permata, Tbk	308	303	299	289
3	PT. Maybank Indonesia, Tbk	391	379	372	359
4	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	111	96	119	122
5	PT. Bank OCBC NISP, Tbk	277	282	256	230
6	PT. Bank Sinarmas	39	39	39	153
7	PT. Bank Tabungan Negara (Perseero), Tbk	45	150	298	340
8	PT. BPD DKI	182	214	242	243
9	PT. BPD DIY	31	34	34	38
10	PT BPD Jateng	145	150	156	156
11	PT. BPD Jatim, Tbk	191	191	191	191
12	PT BPD Sumut	121	121	121	121
13	PT BPD Jambi	7	22	29	30
14	PT BPD Sumbar	34	33	31	31
15	PT BPD Riau dan Kepri	52	52	52	52
16	PT BPD Sum seldan Babel	15	15	18	20
17	PT BPD Kalsel	48	48	48	49
18	PT BPD Kalbar	65	65	65	65
19	PD BPD Kaltim	26	26	26	26
20	PT BPD Nusa Tenggara Barat	6	6	0	0
JUM LAH		2.567	2.624	2.797	2.949

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Oleh karena itu, penulis mengadakan penelitian di salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Pratama Cahaya Mentari Rawalumbu. Penulis ingin mensosialisasikan ke masyarakat sekitar Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Syari'ah dalam melayani pembiayaan syariah yang ada pada BMT PCM Rawalumbu. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Pratama Cahaya Mentari berlokasi di Komplek Pertokoan Pondok Hijau Jl Akasia II, Rawa Lumbu, Kota Bekasi

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bersifat kualitatif dengan memakai metode kuesioner dan studi pustaka. Kuesioner dibagikan kepada para UMKM. Adapun studi pustaka didapat dari Laporan RAT KSPPS Pratama Cahaya Mentari.

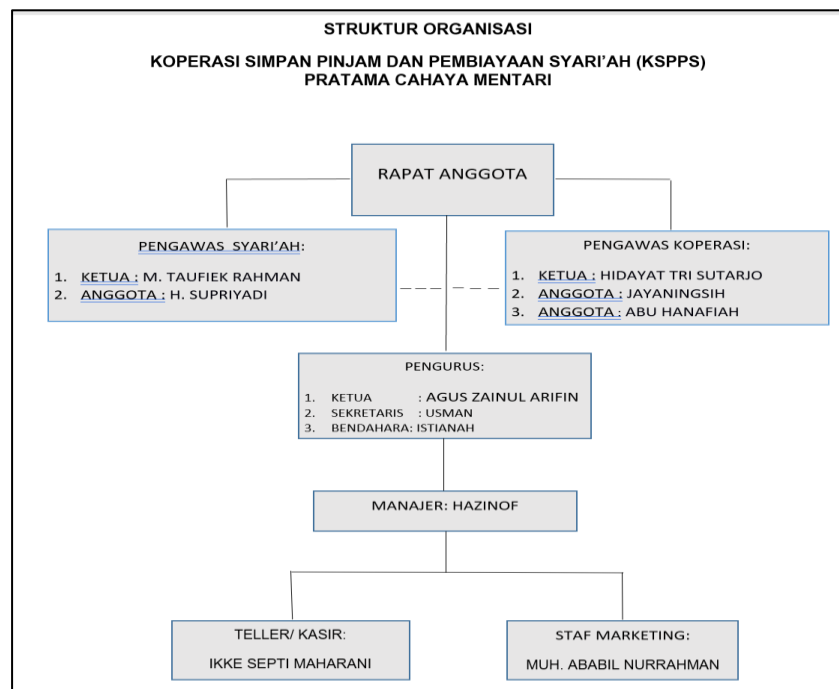
HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pratama Cahaya Mentari berkedudukan di Jl Asia II Blok A/3, Ruko Pondok Hijau Permai, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Didirikan dengan Akta Notaris No. 16 tanggal 30 November 2020 pada Notaris Shintawaty Meirindrasari, SH di Kota Bekasi, KSPPS ini pun sudah disahkan pada tanggal 4 Agustus 2011 oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan nomor: 147/Kep/MKUKM2/VII/2011

Sejak diresmikan pada tanggal 25 November 2020, koperasi yang masih berusia balita ini terus melakukan transformasi dengan harapan dapat mulai tumbuh berkembang secara bertahap dan signifikan. Pembinaan dan perbaikan serta penyempurnaan terus dilakukan. Selama 3 (tiga) bulan terakhir pada awal tahun 2021, sudah mulai memberikan pembiayaan kepada anggota dan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh Pengurus dan Karyawan serta dukungan penuh yang berkesinambungan dari seluruh pemegang saham dan pertolongan dari Allah SWT.

Struktur organisasi pada KSPPS Pratama Cahaya Mentari terdiri dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Pengawas Koperasi. Adapun Dewan Pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Terdiri dari satu manajer, serta dua staff untuk kasir dan marketing.

Gambar 3.1. Struktur Organisasi KSPPS Pratama Cahaya Mentari



Sumber: Laporan Tahunan RAT KSPPS Pratama Cahaya Mentari

**A. Ketua Pengawas Syariah**

Muhammad Taufik Rahman, lahir di Cirebon pada tanggal 20 April 1960. Menyelesaikan studi D3 Politeknik Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta (1983), S1 Sastra Arab diraih dari Universitas Indonesia (1988), dan gelar Magister Manajemen diraih dari STIE Widya Jaya (2007). Sekarang menjabat sebagai DPS BPRS HIK Insan Cita Bogor (2006 – sekarang). Sebagai dosen UIK Bogor (1990 – 2005),

Dosen STIE Mulia Pratama Bekasi (2013 – sekarang). Ketua Pusat Pendidikan dan Pelatihan Terjemah Qur'an (2010 – sekarang), Pengawas Syariah KSPPS BMT Jatikramat Indah (2020 – sekarang).

B. Pengawas Syariah

H. Supriyadi, lahir di Bone tanggal 07 Agustus 1963. Menempuh Pendidikan S1 dari Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana Jakarta (1993). S2 diselesaikan di TBM (2010). Pensiunan pegawai PT PLN (2018). Sekarang ini aktif di Lembaga Hukum Mustika Bangsa.

C. Ketua Pengawas Koperasi

Hidayat Tri Sutardjo, lahir di Kota Malang, 12 Februari 1963. Menyelesaikan studi S1 di Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta (1990). S2 diselesaikan di STIE Mitra Indonesia (1998). Bekerja sebagai Dosen di Universitas STIE Swadaya Jakarta (2008 – sekarang). Dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi (2019 – sekarang). Ia juga aktif sebagai sekretaris di Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah (2015 – 2020).

D. Pengawas Koperasi

Jayaningsih, lahir di Palembang, 25 Mei 1966. Pendidikan D3 dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1989). S1 dari Universitas Tridianti Palembang (2010). S2 diperoleh dari Universitas Tirtayasa Cilegon Banten. Bekerja sebagai ASN Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan Republik Indonesia.

E. Pengawas Koperasi

Abu Hanifah, lahir di Jakarta, 16 Agustus 1953. Menyelesaikan studi di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta (1979). Riwayat pekerjaan sejak tahun 1980 – 2000 bekerja dalam dunia perbankan.

F. Ketua KSPPS

Agus Zainul Arifin, lahir di Bekasi, 18 Agustus 1963. Menyelesaikan studi S1 dari Institut Pertanian Bogor (1986). S2 Program Studi Magister Manajemen UGM Yogyakarta (1990). S3 diraih dari Pascasarjana UNPAD Bandung (2006). Sekarang menjabat sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara.

G. Wakil Ketua KSPPS

Agus Wahyudin, lahir di Jakarta, 15 Agustus 1966. Menempuh studi S1 Jurusan Komunikasi di Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Sekarang sebagai Direktur PT Masako Rayfa Dhuha Sembilan. Ketua Tabloid Berita Trans. Ketua Yayasan Salsabila. Pengelola TK Sofie Salsabila Mangun Jaya Tambun Selatan.



H. Sekretaris KSPPS

Usman Bin Hamzah, lahir di Bima pada tanggal 31 Agustus 1981. Menyelesaikan studi S1 Pendidikan Matematika di STKIP Taman Siswa Bima (2013). S2 Program Pascasarjana Pendidikan MIPA di Unindra. Sekarang bekerja sebagai guru matematika di SMK Teratai Putih Global 2 Bekasi.

I. Bendahara KSPPS

Istianah Salim, lahir di Semarang, 17 Juli 1962. Menyelesaikan studi S1 dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (1988). Sekarang bekerja sebagai pengusaha (wiraswasta).

J. Manajer KSPPS

Hazinof Bin Hawadis, lahir di Payakumbuh tanggal 21 Desember 1960. Menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang (1986). Pernah bekerja di perbankan dan swasta lainnya.

K. Marketing KSPPS

Muh. Ababil Nurrahman, lahir di Bondowoso tanggal 7 Oktober 2000. Sekarang sebagai mahasiswa Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi.

L. Teller / Kasir

Ikke Septi Maharani, lahir di Banyuwangi, 2 September 1995. Menyelesaikan studi SMK Pariwisata di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Secara umum KSPPS BMT Pratama Cahaya Mentari telah melaksanakan kegiatan usaha yang berpedoman pada Program Kerja Perdana November 2020 yaitu sbb:

- 1) Mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PCM Rawalumbu
- 2) Melanjutkan kembali penyusunan SOP dan SOM dalam rangka pengambilan kebijakan strategis meskipun belum tuntas secara keseluruhan.
- 3) Mengadakan rapat bulanan untuk membahas laporan keuangan serta mengevaluasi hasil kinerja, yang dihadiri oleh pengurus, pengawas, dewan syariah, dan pengelola-pengelola dan rapat-rapat khusus oleh pengurus.
- 4) Mengikuti kegiatan-kegiatan sehubungan dengan peningkatan SDM seperti; a) pelatihan pengelolaan koperasi yang baik, b) bimbingan teknis akad syariah & studi banding ke KSPPS lain, c) bimbingan teknis analisis kesehatan koperasi, dan d) Studi banding KSPPS PCM ke KSPPS Surya Kencana Kecamatan WERU, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

**Tabel 3.1. Rencana Kegiatan**

No.	Subbidang, Program, dan Kegiatan	Frekuensi dan durasi	Mahasiswa yang terlibat	Keterangan
1.	Penyelenggaraan sosialisasi BMT Pratama Cahaya Mentari kepada pelajar SD, SMP, SMA dan Dhuafa	1 Jam	Seluruh anggota kelompok	
	1) Menjelaskan pentingnya menabung	30 Menit		
	2) Memperkenalkan koperasi berbasis syariah BMT Pratama Cahaya Mentari	20 Menit		
	3) Mengajak untuk menabung di BMT Pratama Cahaya Mentari	10 Menit		
2.	Penyelenggaraan sosialisasi BMT Pratama Cahaya Mentari kepada UMKM	1 Jam	Seluruh anggota kelompok	
	2) Memperkenalkan koperasi berbasis syariah BMT Pratama Cahaya Mentari	30 Menit		
	1) Menjelaskan keuntungan pinjaman modal ke BMT Pratama Cahaya Mentari	20 Menit		
	3) Mengajak untuk menabung di BMT Pratama Cahaya Mentari	10 Menit		

Produk dan jasa pembiayaan KSPPS Pratama Cahaya Mentari terdiri dari simpanan (tabungan) dan pembiayaan. Simpanan (tabungan) terdiri dari sbb:

- Simpanan Kita, yaitu simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu
- Simpanan Siswa, yaitu simpanan untuk anak yang belum memiliki KTP dan dapat dilakukan penarikan sewaktu-waktu.
- Simpanan Qurban, yaitu simpanan untuk persiapan qurban, dan penarikan simpanan hanya dapat dilakukan menjelang Hari Raya Kurban berupa uang tunai.
- Simpanan Berjangka, yaitu simpanan yang diberlakukan sebagai investasi dan dikelola secara produktif oleh koperasi. Penyimpanan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dan keuntungan yang diperoleh koperasi dan diambil pada saat jatuh tempo. Adapun minimal jumlah setoran yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Berikut adalah hasil olah data kuesioner untuk KSPPS BMT Pratama Cahaya Mentari sebagai berikut:

Tabel 3.2. Hasil Olah Data Kuesioner KSPPS BMT Pratama Cahaya Mentari

1) Variabel Reputasi

No	Daftar Pertanyaan Variabel Reputasi	Alternatif Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	N	T S	ST S
1	BMT PCM Rawalumbu populer dikalangan masyarakat			9	4	
2	BMT PCM Rawalumbu memiliki cita - cita yang baik	8	5			
3	Jaringan perusahaan yang dimiliki BMT PCM Rawalumbu sudah cukup banyak		3	6	4	
4	BMT PCM Rawalumbu memiliki perangkat keuangan yang mutakhir sehingga memudahkan nasabah	2	5	3	3	

2) Variabel Prosedur

No	Daftar Pertanyaan Variabel Prosedur	Alternatif Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	N	T S	ST S
1	Formulir pengajuan yang diberikan BMT PCM Rawalumbu mudah dipahami dan diisi	1	11	1		
2	Mulai dari pengajuan sampai realisasi pembiayaan di BMT PCM Rawalumbu tidak dibutuhkan waktu yang lama	1	8	3	1	
3	Prosedur pengajuan dapat dilakukan secara online dan/atau tatap muka langsung		5	7	1	
4	Realisasi dana yang dibutuhkan sesuai dengan pengajuan		9	2	2	



3) Variabel UMKM

No	Daftar Pertanyaan Variabel Minat	Alternatif Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	N	T S	ST S
1	Pembiayaan yang saya terima dari BMT sudah memenuhi kecukupan kebutuhan bagi usaha saya		4	7	1	1
2	Bagi hasil dari pembiayaan yang saya terima dari BMT PCM Rawalumbu sudah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak perjanjian		5	7		1
	Angka tertinggi dari setiap pernyataan	8	11	9	4	1
	Nilai minimum	13				
	Nilai maksimum	65				
	Persentase	50,7 7				
	Pembulatan persentase	51%				

Kesimpulan pada tabel 3.1 bahwa pelaksanaan KSPPS Pratama Cahaya Mentari sudah berjalan 51%. Selain itu, KSPPS Pratama Cahaya Mentari juga melayani pembayaran jasa pelayanan *online (payment point online bank)* antara lain yaitu: 1) Jasa Pembayaran Telepon, 2) Jasa Pembayaran Tagihan Listrik (token), 3) Jasa Pengisian Pulsa, 4) Jasa Pembayaran BPJS, dan 5) Jasa Pengisian OVO.

Dalam menjalankan perannya, KSPPS BMT Pratama Cahaya Mentari mempunyai potensi untuk berjalan dengan adanya support yang luar biasa oleh warga Muhammadiyah dan lingkungan setempat. Selain support dari masyarakat, BMT PCM memiliki pilar yang kokoh antara lain produk dan layanan yang beragam dan solutif.

Sistem prosedur yang terkini, kehati-hatian, dan patuh syariah SDI dan kepemimpinan yang integritas, profesional dan kompeten, infrastruktur yang berupaya handal, kokoh dan adaptif, aman, dan terarah.

KSPPS BMT Pratama Cahaya Mentari setiap bulannya juga selalu mengingatkan para anggota untuk melakukan kewajiban setiap bulannya. Program-program KSPPS BMT PCM kedepannya akan lebih banyak dalam pengumpulan dana bergulir. Hal ini dikarenakan jika hanya memusatkan pada dana kewajiban sebagai anggota maka akan sangat berat dalam perkembangan KSPPS BMT PCM kedepan dengan terbatasnya dana yang bisa dimanfaatkan.



Promosi yang dilakukan pun masih sangat terbatas. Penyebaran informasi hanya menggunakan penyebaran brosur di sekitar Rawalumbu. Belum menggunakan promosi lewat website dan/atau media sosial yang bisa dilihat dan/atau dijangkau oleh banyak orang. Sehingga hasil yang didapatkan belum optimal karena masyarakat banyak sekali yang belum mengetahui KSPPS BMT Pratama Cahaya Mentari. Program apa saja yang ada dan apa fungsi dari Koperasi Simpan Pinjam juga masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, KSPPS BMT Pratama Cahaya Mentari sangat berharap agar kedepannya dapat berkembang dan berinovasi lebih baik lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang bergerak dibidang keuangan baik penghimpunan maupun pembiayaan serta operasional di bidang jasa keuangan lainnya bagi nasabah atau masyarakat yang menggunakannya. Lembaga keuangan syariah yang paling banyak dituju oleh pelaku UMKM diantaranya adalah perbankan syariah dan *Baitul maal Wat Tamwil* dalam memenuhi dana untuk modal usaha. Serta peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam membantu para mustahik yang bergerak dibidang UMKM.

Dalam menjalankan perannya, KSPPS BMT Pratama Cahaya Mentari mempunyai potensi untuk berjalan dengan adanya support yang luar biasa oleh warga Muhammadiyah dan lingkungan setempat. Selain support dari masyarakat, BMT PCM memiliki pilar yang kokoh antara lain produk dan layanan yang beragam dan solutif. Sistem prosedur yang terkini, kehati-hatian, dan patuh syariah SDI dan kepemimpinan yang integritas, profesional dan kompeten, infrastruktur yang berupaya handal, kokoh dan adaptif, aman, dan terarah.

KSPPS BMT Pratama Cahaya Mentari setiap bulannya juga selalu mengingatkan para anggota untuk melakukan kewajiban setiap bulannya. Program-program KSPPS BMT PCM kedepannya akan lebih banyak dalam pengumpulan dana bergulir. Hal ini dikarenakan jika hanya memusatkan pada dana kewajiban sebagai anggota maka akan sangat berat dalam perkembangan KSPPS BMT PCM kedepan dengan terbatasnya dana yang bisa dimanfaatkan.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an, *Departemen Agama RI*. Surat Ar-Rum : 39

Abdurrahman Firdaus Thaha, "*Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia*,"162.

Azwar Iskandar, Dkk, "*Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemic Covid-19*," Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i Volume.7 Nomor 7 juli 2020. (n.d.): 626.)

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

<http://eprints.perbanas.ac.id/312/3/BAB%20I.pdf>

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2009).

Khuzaifah Hanum, *Advertisements*, akses tgl 23 Oktober 2020

Laporan Tahunan KSPPS PCM Rawalumbu

Statistik Perbankan Syariah *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK)